

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adiwilaga, Rendy. Yani Alfian dan Ujud Rusdia, 2018. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Busrizalti, 2013. *Hukum Pemda (Otonomi Daerah Dan Implikasinya)*, Yogyakarta: Total Media.
- Djohan, Djohermansyah 2005. *Fenomena Etnosentrisme dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas pemerintahan Daerah*, Jakarta: Yayasan Obor.
- Haris, Syamsuddin. 2019, “*Desentralissi, Otonomi, Dan Pemekaran Daerah Di Indonesia*”, Jakarta: Kencana.
- Helbra Tanrini, Rita. 2008, “*Pemekaran Daerah: Kebutuhan Atau Euphoria Demokrasi? Mengapa Harus Mekar*” Jakarta: Kencana.
- Husen, La Ode. 2019. *Negara Hukum, Demokrasi Dan Pemisahan Kekuasaan*. Makassar: Cv. Social Politic Genius.
- Irwansyah, 2020. *Penelitian Hukum pilihan Metode & Praktis Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mitra Buana Media.
- Ishaq. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jeddawi, Murtir. 2009, “*Pro Kontra Pemekaran Daerah (Analisis Empiris)*”, Yogyakarta: Total.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Ratnawati, Tri. 2009, “*Pemekaran Daerah*”, Jakarta: Pustaka Belajar

Sikumbang, Sony Maulana. Fitriani Ahlan Sjarif, M.Yahdi Salampessy. 2008. *pengantar ilmu pengetahuan perundang-undangan*. Jakarta: Rinneka Cipta.

Sunarno, Siswanto. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Susmayanti, Riana. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Universitas Brawijaya

Syamsir dan Iswandi, 2020. *(Bahan Ajar Hukum Tata Negara)*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 32 Tahun 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125*

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162*

C. Karya Ilmiah

Alinapia. 2013. "Pemekaran Daerah dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Sumatera Utara", *Jurnal Justitia*, Vol 01, No. 01.

Athahirah, Astika Ummy dan Rossy Lambelanova, 2019. "Kesiapan Pemekaran "Kabupaten Renah Indojati" Di Provinsi Sumatera Barat", *Sosiohumaniora-Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol 21, No. 01

- Bauw, Aziez. 2018. "Prosedur Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah" *Legal Pluralism*, Vol 8 No. 1.
- Dewi, Ni Luh Putu Suartami dan Ni Made Ari Yulianti Griadhi, "Analisis Yuridis Terkait Pemekaran Daerah Berdasarkan Prinsip Otonomi Daerah", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*
- Kutsiyah, Farahdilla. Dan Abdurrahman, 2022, "Persyaratan Dasar Pemekaran Wilayah Pamekasan Dalam Upaya Mendukung Pembentukan Provinsi Madura", *Praja*, Vol 10, No 3.
- Lubis, Khairul Fahmi. 2013, "Otonomi Daerah Untuk Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Otonomi Daerah Dan Pemekaran Wilayah", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol 01, No. 02.
- Mumek, Gwyne E. Rudy R. Watulingas, dan Nixon S. Lowing. 2018. "Tinjauan Yuridis Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", *Jurnal Lex Administratum*, Vol VIII, No. 4.
- Muqoyyidin, Andik Wahyun. 2013. "Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi Ke Depan," *Jurnal Konstitusi*, Vol 10, No. 2.
- Nurcholis, Hanif. Dan Ace Sriati Rachman, "Kinerja Daerah Otonom Baru Hasil Pemekaran Daerah Kasus Kota Depok. Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah". *Jurnal Labane*, Vol IV, No. 4
- Septiani, Bella. 2022, "Faktor-Faktor Yang Menghambat Terbentuknya Pemekaran Provinsi Kapuas Raya Sebagai Provinsi Baru Di Kalimantan Barat", *Aspirasi Jurnal*.
- Sittara, Muh. Askar. 2017. "Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Desa Barugae Kecamatan Duampanua Kabupatn Pinrang," *Skripsi Sarjana Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar*, Makassar
- Suaib, Rahmat. 2020. "Urgensi Pemekaran Daerah Di Indonesia", *Jurnal Government Of Archipelago*, Vol 1, No. 1.

Syahraini, Silva. Teori Teori Dalam Pemerintahan Daerah, *jurnal Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang*.

Winda, Puspita Sari Shelly dan Meri Yarni. 2021. “Analisis Pengaturan Pemekaran Daerah Kabupaten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, *Limbago Journal Of Constitutional Law*, Vol 1, No. 1.

D. Website

Artikel Pendidikan, Pengertian Hak Dan Kewajiban Menurut Para Ahli, <https://artikelpendidikan.id/pengertian-hak-dan-kewajiban/>, diakses tanggal 10 Januari 2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Pemekaran,” Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), <https://kbbi.web.id/mekar>, diakses pada tanggal 11 Mei 2023